

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **“Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Blitar”** Ditulis oleh Nudiya sari Mey Dita Zulafa, NIM : 17402163625. Pembimbing Ahmad Syaichoni, M.Sy.

Penelitian dilatar belakangi oleh Negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan merupakan negara berkembang. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia juga mempengaruhi tingginya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Upah minimum yang diberikan kepada pekerja harus benar-benar diperhitungkan agar upah minimum tersebut berkeadilan bagi pekerja. Upah minimum sendiri ditentukan agar pengusaha memiliki acuan untuk membayarkan upah paling sedikit sesuai dengan upah minimum yang berlaku pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan penetapan Upah Minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah (1.) Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Blitar ?(2.) Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Blitar ?. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan peran Dinas Tenaga Kerja dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Blitar dan untuk mendeskripsikan peran Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Blitar.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data penelitian adalah observasi , wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar yang dilakukan dalam mengambil keputusan yang dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah republik Indonesia nomer 78 tahun 2015 tentang

pengupahan menimbang bahwa untuk meaksanakan ketentuan pasal 97 undang undang nomer 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengupahan. Factor yang dapat mendukung dan memfasilitasi dengan penetapan upah minimum untuk direkomendasikan kepada Gubernur. Sedangkan untuk penghambatnya adalah harga kebutuhan yang fluktuatif atau tidak menentu dan tidak bisa ditebak besaran upah minimum kabupaten (UMK) per tahunnya. Factor yang mampu mendukung penetapan upah minimum kabupaten (UMK) untuk kesejahteraan ekonomi yaitu dengan melakukan survey kebutuhan hidup layak (KHL) per 3 bulan dalam satu tahunnya dan mencocokkan dengan rumus upah minimum.

Kata kunci: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Upah Minimum Kabupaten (UMK), Kesejahteraan ekonomi.

ABSTRACT

Thesis with the title **"The Role of the Manpower Office of Blitar Regency in Determining the Regency Minimum Wage (UMK) to Improve the Economic Welfare of the Blitar Regency Community"** Written by Nudiya sari Mey Dita Zulafa, NIM : 17402163625. Supervisor Ahmad Syaichoni, M.Sy.

The dilator research is based on the country with the fourth largest population in the world and is a developing country. The high population in Indonesia also affects the high needs of life that must be met. The minimum wage given to workers must really be taken into account so that the minimum wage is fair for workers. The minimum wage itself is determined so that employers have a reference to pay wages at least in accordance with the minimum wage applicable to the legislation. Therefore, it is necessary to determine the Minimum Wage to meet the needs of a decent living (KHL).

The focus of the research in this thesis is (1.) What is the role of the Manpower Office in determining the Regency Minimum Wage (UMK) in Blitar Regency? (2.) What is the role of the Manpower Office in improving the economic welfare of the people in Blitar Regency?. The purpose of this study is to describe the role of the Manpower Office in determining the District Minimum Wage (UMK) in Blitar Regency and to describe the role of the Manpower Office in improving the economic welfare of the people in Blitar Regency.

This research is a research using descriptive qualitative research method. Techniques in collecting research data are observation, interviews and documentation.

The results show that the role of the Manpower Office of Blitar Regency is carried out in making decisions that are carried out in accordance with the Republic of Indonesia government regulation number 78 of 2015 concerning wages, considering that in order to implement the provisions of Article 97 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, it is necessary to stipulate government regulations regarding Remuneration. Factors that can support and facilitate the

setting of minimum wages to be recommended to the Governor. Meanwhile, the obstacle is the fluctuating or erratic price of necessities and the unpredictable amount of the district minimum wage (UMK) per year. The factor that is able to support the determination of the district minimum wage (UMK) for economic welfare is by conducting a decent living needs survey (KHL) every 3 months in one year and matching it with the minimum wage formula.

Keywords: Manpower Office of Blitar Regency, Regency Minimum Wage (UMK), Economic Welfare.